



Judul : DPR : Bujuk Saudi Untuk Kuota Haji
Tanggal : Senin, 07 Februari 2022
Surat Kabar : Republika
Halaman : 16

DPR: Bujuk Saudi untuk Kuota Haji

RI dinilai dapat mengisi kuota negara lain yang tak terpakai.

■ DEA ALVI SORAYA

JAKARTA — Pemerintah diminta memaksimalkan peluang para calon jamaah haji untuk dapat berangkat ke Tanah Suci pada tahun ini. Hal itu disampaikan Wakil Ketua Komisi VIII DPR-RI, Marwan Dasopang. Menurut dia, secara statistik Indonesia selalu memiliki kesempatan yang lebih lapang karena memperoleh kuota haji yang terbesar dibandingkan negara-negara lain.

Marwan mengakui, ada kemungkinan Kerajaan Arab Saudi akan memangkas kuota haji tahun 2022 untuk seluruh negara. Terlebih, sejak awal tahun ini dunia masih dilanda pandemi Covid-19. Namun, ia meminta pemerintah untuk terus melobi Saudi agar tidak ada kuota yang terbuang dari negara-negara yang tidak dapat membangkangkannya ke Baitullah.

"Kita meyakini, banyak negara lain yang kesulitan untuk mengirimkan jamaah, dengan tingginya ongkos haji yang perlu dikeluarkan. Jadi, upayakan lobi agar adanya penambahan kouta jamaah untuk Indonesia," ujar Marwan Dasopang kepada *Republika*, Ahad (6/2).

Politikus Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) itu meneruskan, sis-

tem penyelenggaraan haji Indonesia memiliki perbedaan dengan sejumlah negara lain. Misalnya, pada adanya dana haji dan daftar antrean haji. Karena itu, kata dia, Pemerintah RI dapat membujuk Saudi agar "memberikan" kuota haji negara lain yang tidak terpakai kepada Indonesia.

Ia mengasumsikan, total jamaah haji pada masa sebelum pandemi mencapai 2 juta orang. Akibat wabah Covid-19, jumlah tersebut dipangkas menjadi kira-kira setengahnya, yakni satu juta jamaah. Kemudian, berbagai pertimbangan membuat banyak calon jamaah dari negara-negara tertentu untuk membatalkan keberangkatannya ke Baitullah.

"Maka kita akan mendorong pemerintah agar kita mendapat kesempatan untuk mengisi kekosongan itu," katanya.

Saat ini, DPR dan Kementerian Agama (Kemenag) telah membentuk panitia kerja dalam rangka mempersiapkan pelaksanaan haji 2022. Marwan mengatakan, pihaknya akan mengupayakan perubahan Sistem Komputerisasi Haji Terpadu (Siskohat) apabila Saudi memangkas kuota haji RI.

Menurut dia, revisi Siskohat perlu untuk memastikan adanya

representasi yang proposional dari setiap wilayah asal calon jamaah. Jangan sampai ada masyarakat yang kecewa karena tidak ada satu calon jamaah pun yang diberangkatkan dari daerah domisilinya.

Apresiasi

Sebelumnya, Direktur Jenderal Penyelenggaraan Haji dan Umrah (PHU) Kemenag Hilman Latief menyatakan, Pemerintah Saudi mengapresiasi kedisiplinan jamaah Indonesia saat menunaikan umrah di Tanah Suci. Menurut Hilman, pihaknya terus menjalin komunikasi dengan Kementerian Haji Saudi agar pelaksanaan umrah dalam sebulan terakhir dapat menjadi evaluasi untuk selanjutnya.

"Alhamdulillah, hasil dari komunikasi Kementerian Agama dengan Menteri Haji Arab Saudi,



**Kita akan
mendorong
pemerintah agar
kita mendapat
kesempatan untuk
mengisi
kekosongan itu.**